

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Aristoteles menyatakan hakikatnya manusia merupakan makhluk *zoon politicon*, dalam definisi sederhana ini diartikan sebagai manusia yang berpolitik. Definisi yang lainnya juga menunjukkan bahwa sebagai makhluk politik, maka manusia akan senantiasa berhubungan, berinteraksi, berkontak sosial dengan sesamanya dan manusia tidak dapat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lain. Oleh karena itu, manusia akan selalu melakukan suatu interaksi sosial, yang mana interaksi sosial ini akan membentuk kehidupan berkelompok pada masyarakat (Winarno, 2012).

Adanya suatu hubungan, interaksi, dan kontak sosial antar masyarakat, akan memungkinkan terjadinya suatu hubungan politik. Hubungan politik pada masyarakat ini terjadi secara alami dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dalam hubungan politik yang terjadi antar masyarakat inilah yang nantinya akan dapat memunculkan suatu kompetisi untuk memperrebutkan kekuasaan baik kekuasaan legal formal maupun kekuasaan kultural. Selain itu, contoh lain yang terjadi dalam hubungan suatu politik yaitu seperti keinginan seseorang untuk mendapatkan suatu posisi dan lebih dikenal oleh masyarakat, keinginan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar pendapat yang diutarakan dapat diterima oleh masyarakat, dan keinginan seseorang agar apa yang dikehendaki dapat dilakukan oleh orang lain (Suhelmi, 2004).

Sifat dasar manusia sebagai makhluk *zoon politicon*, tentunya akan memunculkan juga suatu keinginan untuk saling menguasai baik melalui mekanisme sistem politik maupun melalui hegemoni dalam masyarakat. Hegemoni dalam masyarakat ini tentunya di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena perbedaan kepentingan, sarana perolehan suatu keuntungan dan untuk

melanggengkan apa yang telah dilakukan. Hegemoni ini biasanya dilakukan oleh seorang individu kepada individu lain, individu kepada kelompok, maupun kelompok kepada kelompok, begitupun sebaliknya (Robbins, 2008).

Hegemoni dimaknai sebagai suatu kemenangan atau kekuasaan yang diperoleh bukan melalui sebuah penindasan atas kelas sosial yang lainnya melainkan terjadi karena kesepakatan atau konsesus (Gramsci, 1971).

Ketika berbicara mengenai suatu hegemoni tentu didalamnya terdapat sistem atau ideologi yang berkenaan dengan kebijakan, pengambilan suatu keputusan yang akan di tetapkan dan kekuasaan. Sistem, pengambilan keputusan, dan kekuasaan ini di kemas dalam suatu ideologi yang baru, dengan harapan ideologi ini dapat diikuti dan diterima oleh seluruh masyarakat. Ideologi ini telah dikonsep secara matang dan sedemikian rupa oleh pihak tertentu yang salah satu fungsinya adalah untuk memperoleh suatu keuntungan. Suatu penindasan yang telah terkonep secara matang ini, akan menjalar ke segala bidang seperti pemerintahan, dan politik misalnya (Gramsci, 1971).

Dalam suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan, mereka membutuhkan suatu mekanisme atau perangkat untuk mempertahankan suatu kekuasaan yaitu diantaranya hegemoni. Fungsi dari hegemoni ini selain untuk melanggengkan kekuasaan bagi kelompok yang lemah juga digunakan untuk menciptakan suatu cara fikir baru tentang suatu hal yang dominan yang nantinya juga dapat diterima oleh masyarakat (Sugiono, 2006).

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro, karena telah mendapatkan kekuasaan maka Bupati kabupaten Bojonegoro menggunakan kekuasaannya untuk menghegemoni masyarakat yang nantinya hegemoni ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga menjadi identitas baru bagi masyarakat Bojonegoro. Hegemoni yang dilakukan ini tentu saja memiliki sebuah bentuk, maksud dan tujuan untuk Bupati itu sendiri, untuk identitas kelompok, maupun masyarakat. Hegemoni ini dilakukan melalui politik warna kabupaten Bojonegoro yaitu berwarna hijau dan

merah dan partai pengusung Bupati Bojengoro adalah partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai partai pengusung Wakil Bupati. Penggunaan warna hijau dan merah akan digunakan sebagai warna dari seluruh pembangunan infrastruktur yang ada. Seperti jembatan, jalan raya, warna sekolah, maupun warna seragam dari beberapa instansi.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, informan menyatakan hegemoni penggunaan politik warna yang telah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro melalui suatu tindakan dan lisan yang telah dipaparkan oleh Bupati dalam rapat SUB-BKBD antar kecamatan. Karena masih terdapat beberapa anggota yang belum menggunakan batik dengan warna hijau dan merah yang dijadikan sebagai seragam resmi anggota SUB-BKBD se Kabupaten Bojonegoro. Yaitu himbauan kepada seluruh anggota SUB-BKBD untuk menggunakan batik dengan warna hijau dan merah yang telah dibeli oleh Bupati. Hal tersebut mendapatkan respon yang baik dari anggota SUB-BKBD yang hadir.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawwanah menyatakan bahwa pemilihan warna hijau dan merah ini memiliki suatu alasan, yaitu warna hijau melambangkan kesegaran, kesehatan, kealamian, pembaharuan, dan kedamaian. Kemudian warna merah menyimbolkan energi, keseimbangan dan kehangatan. Pada warna merah memiliki simbol hasrat, intensitas dan keinginan yang sangat besar untuk tetap selalu maju. Pemilihan warna merah ini juga dilatar belakangi karena warna merah menyimbolkan suatu cinta, kehangatan, power, energy, ndan nafsu. Warna merah juga sangat disukai karena memiliki arti kebahagiaan (Septiyaningrum Widyastuti, 2019).

Penggunaan bangunan dengan menggunakan warna hijau dan merah ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Masyarakat dapat menerima begitu saja tanpa adanya sebuah penolakan, bahkan mereka menganggap bahwa hal tersebut memang harus dilakukan. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti salah satunya karena kepemimpinan Bupati Bojonegoro terpilih 2018 Anna

Mu'awwanah, pembangunan berbagai infrastruktur dapat merata dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tinggal didesa. Misalnya pembangunan jalan poros yang ada diseluruh Desa di Kecamatan Kepohbaru.

Dari uraian permasalahan yang ada diatas, belum ada suatu penelitian yang mengangkat penelitian tentang politik warna yang ada di Kabupaten Bojonegoro, sehingga memberikan peluang besar kepada peneliti untuk dijadikan sebagai penelitian baru kedepannya. Dengan adanya hal ini tentu peneliti menjadi lebih tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang diatas maka peneliti akan mengambil judul penelitian ''Politik Warna Bentuk Hegemoni pemerintah Kabupaten Bojonegoro'' dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus untuk mengkaji penelitian tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1.) Bagaimana praktik politik warna sebagai hegemoni Bupati Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat?

## **1.3 Tujuan**

Dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui praktik politik warna sebagai hegemoni yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro kepada Masyarakat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang kemudian dapat di kembangkan di kemudian hari. Berbagai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun aktivis dan peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang sebuah hegemoni yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya tentang politik warna.
2. Manfaat Praktis penelitian ini adalah menghasilkan data empiris yang kemudian dapat dijadikan bahan rujukan penyelesaian masalah pada masyarakat sekitar.